

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016**

RINGKASAN EKSEKUTIF



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.

Dengan luas wilayah provinsi DKI Jakarta yang mencapai 66,233 Km² berdasarkan inventarisasi sumberdaya lahan menurut klasifikasi penggunaan lahan di DKI Jakarta pada Tahun 2016 pergeseran penggunaan lahan tidak terlalu jauh atau dengan kata lain terjadi sedikit perubahan dari keadaan Tahun 2015, hal ini terlihat dari data untuk Pemukiman/ adalah seluas 567,25 Km² (85,64% dari total luas wilayah; Pertanian seluas 72,77 Km² (10,99%); Hutan dan Hutan Kota: 11,01 Km² (1,07%); Lahan Lain/Sungai: 7,07 Km² (1,07%) dan Waduk/Rawa/Danau: 4,23 (0,64%).



Gambar 1. Tabel Penggunaan Lahan

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2016

2. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Luas kawasan Hutan di DKI Jakarta pada Tahun 2016 menurut fungsi dan statusnya adalah sebesar 1.101,01 Ha.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status

No.	FUNGSI	LUAS (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi Tetap	158,35
2	Hutan Lindung	44,76
3	Taman Nasional	107528,5 (39,5 Ha daratan ; 107.489 Ha perairan)
4	Taman Wisata Alam	99,82
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam	18,00
7	Suaka Margasatwa	25,02



No.	FUNGSI	LUAS (Ha)
8	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	108393,06 (428,61 Ha daratan ; 107.964,45 perairan)
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	187,78
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2016.

3. Kualitas Air

a. Kondisi Sungai di Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta dialiri 13 sungai: Sungai Ciliwung (utama) ditambah 12 (sebelas) sungai kecil seperti sungai Angke, Kamal, Tanjungan, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Cideng, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Secara umum sungai telah mengalami degradasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kualitas air sungai memburuk dengan kondisi tercemar, sedangkan secara kuantitas Sungai juga sudah tidak memiliki debit yang mantap. Adanya sampah padat dan limbah cair pada badan air sungai membuat kondisi sungai semakin memburuk. Air hujan dapat langsung masuk ke sungai sehingga air melimpah dan dapat menyebabkan banjir dan pada musim kemarau sungai mengering karena tidak ada simpanan air tanah yang dapat mengisi sungai.

Tabel 2. Persentase Status Mutu Air Sungai di DKI Jakarta Tahun 2016

STATUS MUTU	JUMLAH	PERSENTASE (%)
Cemar Berat	115	43,89
Cemar Ringan	43	16,41
Cemar Sedang	102	38,93
Memenuhi Baku Mutu	2	0,76
TOTAL	262	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2016.

b. Kondisi Situ/Danau/Waduk/Embung di Provinsi DKI Jakarta

Waktu pengambilan sampel pada periode Bulan Pebruari dan Agustus Tahun 2016 pada 202 titik dari 43 lokasi dan dua periode, dengan rekapitulasi indeks pencemaran dapat dilihat pada Tabel dibawa :

Tabel 3 . Rekapitulasi Indeks Pencemaran Air Situ

No.	STATUS	PERIODE 1		PERIODE 2	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	memenuhi baku mutu/kondisi baik	5	4,95	3	2,97
2	cemar ringan	55	54,46	62	61,39
3	cemar sedang	27	26,73	24	23,76
4	cemar berat	14	13,86	12	11,88
TOTAL		101	100	101	100

Sumber: Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2016

c. Kualitas Air Tanah/Sumur

Rekapitulasi status mutu (Indeks Pencemaran) Air Tanah :

Tabel 4 . Status Mutu (Indeks Pencemaran) Air Tanah Periode Kesatu di DKI Jakarta Tahun 2016

STATUS MUTU (IP)	JUMLAH	PERSEN %
memenuhi baku mutu/kondisi baik	74	37,56
cemar ringan	88	44,67
cemar sedang	29	14,72
cemar berat	6	3,05
TOTAL	197	100

Sumber : Perhitungan Tahun, 2016

4. Kualitas Udara

Dari hasil perhitungan status mutu kualitas udara lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta, menunjukkan bahwa kondisi status mutu Kualitas Udara termasuk kategori tercemar, dengan ISM: 0,268 (Jakarta Pusat: Bunderan HI); ISM: 0,219 (Jakarta Utara: Kelapa Gading); ISM: 0,173 (Jakarta Selatan: Jagakarsa); ISM: 0,224 (Jakarta Timur: Lubang Buaya); dan ISM: 0,189 (Jakarta Barat: Kebon Jeruk)

5. Kondisi Laut, Pesisir dan Pantai di Provinsi DKI Jakarta

a. Luas Tutupan Terumbu Karang

Pengamatan yang dilakukan selama kurun waktu 22 tahun mencatat jenis terumbu karang yang terdapat di Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta mencakup 68 genera dan subgenera dengan 134 spesies. Pengamatan yang dilakukan terakhir dapat memperjelas kondisi terumbu karang di kawasan Kepulauan Seribu. Terumbu karang yang teramati berada dalam kondisi baik sebesar 50 persen dan sedang sebesar 50 persen. Kondisi kehidupan karang yang berada dalam kategori baik hanya terdapat di beberapa lokasi seperti P. Kayu Angin Bira dan P. Melintang. Terumbu karang yang teramati berada dalam kondisi baik sebesar 50 persen dan sedang sebesar 50 persen. Kondisi karang yang berada dalam kategori baik hanya terdapat di beberapa lokasi seperti P. Kayu Angin Bira dan P. Melintang.

b. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Persentase tingkat kerusakan berkisar antara 0 – 88,26% (P. Pamegaran Besar)



c. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Berdasarkan data tahun 2016, sebaran mangrove dijumpai di wilayah pesisir Kapuk Muara dan Kepulauan Seribu, dengan total luasan mencapai 76,69 ha.

Tabel 5. Lokasi Sebaran dan Luas Kawasan Mangrove

No.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	39,58
2	Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	14,60
3	Kab. Adm Kep Seribu	Kep. Seribu Selatan	Pulau Untung Jawa	21,20
4	Kab. Adm Kep Seribu	Kep. Seribu Selatan	Pulau Pari	1,31
JUMLAH				76,69

Sumber: : Taman Nasional Laut Kep.Seribu, Dinas Kehutanan, BKSDA, 2016.

d. Kualitas Air Laut

Teluk Jakarta yang merupakan muara dari 13 sungai besar di Jakarta mulai dari muara Sungai Cisadane di bagian barat sampai muara Sungai Citarum di bagian timur menjadikan tempat pembuangan akhir limbah cair yang berasal dari berbagai tempat usaha dan permukiman.

Kualitas air laut berdasarkan parameter pH memiliki hasil yang bervariasi. Nilai pH normal berkisar diantara 6,5-8,5. Parameter TSS memiliki hasil yang cukup baik. Seluruh sampel memenuhi baku mutu dengan nilai 80 mg/L.

Parameter BOD memiliki hasil yang cukup baik. Seluruh sampel memenuhi baku mutu dengan nilai dibawah 20 mg/L. parameter Nitrat memiliki hasil yang bervariasi. Beberapa sampel melampaui baku mutu yaitu sebesar 0,008 mg/L. total bakteri Coli memiliki hasil yang cukup baik.

6. Iklim

a. Curah Hujan

Tabel 6. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

No.	NAMA DAN LOKASI STASIUN PEMANTAUAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	JAKARTA SELATAN	183,0	313,2	142,4	301,3	252,6	189,3	290,9	335,8	284,7	272,9	373,4	99,0
2	JAKARTA TIMUR	210,9	499,8	226,0	181,2	286,0	245,6	153,6	170,5	339,8	336,4	-	-
3	JAKARTA PUSAT	144,2	531,8	350,1	204,0	156,3	171,9	264,5	227,2	240,4	146,8	199,9	58,3
4	JAKARTA BARAT	153,9	384,5	128,9	44,1	156,6	164,6	142,0	97,2	88,8	225,6	72,0	103,0
5	JAKARTA UTARA	156,7	404,7	275,9	169,3	78,9	180,3	108,3	207,7	252,9	159,4	104,9	25,3
6	KEP. SERIBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta, 2016



b. Suhu, Kelembaban Udara dan Kecepatan Angin Rata-Rata

Wilayah DKI Jakarta termasuk daerah tropis, dengan suhu rata-rata per tahun 28°C; kelembaban antara 80 – 90 %; suhu tahunan maksimum 30°C , minimum 27°C. Kecepatan angin rata-rata 11,2 Km/jam.

7. Risiko Bencana

a. Bencana Banjir

Tahun 2016 dimana hujan terjadi mulai bulan Januari yaitu sebanyak 26 Hari Hujan, Februari sebanyak 22 Hari Hujan, Maret sebanyak 20 Hari Hujan, April sebanyak 16 Hari Hujan, Mei sebanyak 10 Hari Hujan, Juni sebanyak 12 Hari Pada periode 2016, masih terdapat area genangan banjir pada 177 titik lokasi di wilayah DKI Jakarta (Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016).

b. Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian

Di Provinsi DKI Jakarta selain ancaman bencana banjir yang melanda setiap tahun, dalam kenyataannya juga banyak terjadi kasus bahaya kebakaran. Pada Tahun 2016 jumlah kebakaran 1.562 kejadian dengan jumlah korban mencapai 22 orang meninggal dunia, serta jumlah kerugian mencapai Rp. 377.812.400.000,-, (Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015).

8. Perkotaan

Luas Wilayah Jumlah Penduduk. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kab/Kota dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (km ²)	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK per km ²
1	JAKARTA SELATAN	141,37	2.206.732	0,96	15.609,62
2	JAKARTA TIMUR	188,03	2.868.910	0,88	15.257,72
3	JAKARTA PUSAT	48,13	917.754	0,39	19.068,23
4	JAKARTA BARAT	129,54	2.496.002	1,32	19.268,20
5	JAKARTA UTARA	146,66	1.764.614	0,99	12.032,01
6	KEPULAUAN SERIBU	8,70	23.616	1,18	2.714,48
	Total	662.33	10.277.628		15.515.04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016



9. Isu Prioritas Lingkungan Hidup

a. Banjir

Masalah banjir yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena secara geografis posisi DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan sebagai fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari 13 sungai, dengan curah hujan rata-rata 2.000 mm per bulan, yang mana curah hujan maksimum tertinggi terjadi pada bulan Januari - Maret. Begitu pula adanya penurunan tanah akibat pembangunan dan pengambilan air tanah dalam yang terus terjadi. Urbanisasi dan penambahan penduduk akibat angka kelahiran merupakan penyebab kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Masih ada rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah kumuh dan bantaran sungai, lahan terbuka hijau yang kurang, serta kondisi drainase yang buruk, tersebar di lima wilayah kota DKI Jakarta. Kondisi tersebut di atas adalah beberapa faktor penyebab terjadinya bencana banjir yang masih menggenangi kota di DKI Jakarta.

Perilaku masyarakat DKI Jakarta terutama di sepanjang bantaran sungai juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, karena warga mempunyai perilaku yang masih membuang sampah ke sungai dan terdapatnya rumah liar yang menambah mempercepat terjadinya penyempitan sungai, akhirnya mengurangi kecepatan aliran air menuju ke arah hilir (laut).

b. Sampah

Jumlah timbulan sampah harian di DKI Jakarta mencapai 7.147,36 ton/hari, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Timbulan Sampah Perhari

No.	KABUPATEN/KOTA	TIMBULAN PER HARI (Ton)	TERANGKUT PER HARI (Ton)	SISA(Ton)
1	JAKARTA SELATAN	1.183	912,94	270,06
2	JAKARTA TIMUR	1.849	1.668	181,00
3	JAKARTA PUSAT	1.228,68	1.228,68	0,00
4	JAKARTA BARAT	1.574,92	1.555,14	19,78
5	JAKARTA UTARA	1.295,76	1.111,68	184,08
6	PESISIR DAN PANTAI	16,00	15,31	0,69
	Total	7147,36	6.492	655,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam BPS, 2016.



c. Transportasi

Banyak faktor penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Kemacetan selain disebabkan kondisi tersebut di atas juga disebabkan kurangnya disiplin warga, diantaranya perilaku sebagian besar pengguna jalan yang belum tertib/tidak disiplin, masalah parkir kendaraan yang belum memadai dan tidak tertib, penyalahgunaan badan jalan untuk parkir, dan pedagang kaki lima. Berbagai masalah yang saling berkorelasi inilah yang menyebabkan masalah transportasi DKI Jakarta menjadi semakin kompleks. Namun secara eksplisit terlihat bahwa penyebab utama kemacetan lalu lintas adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah panjang jalan terutama kendaraan bermotor pribadi yang semakin banyak dan mobilitasnya (penggunaannya) yang semakin tinggi dari segi ruang dan waktu.

d. Permukiman

Permasalahan yang menjadi sorotan antara lain; ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan dan kejahatan. Jumlah penduduk 10.277.628 jiwa pada tahun 2016; luas wilayah Provinsi DKI Jakarta 662,43 km², dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 15.515,04 jiwa per km².

e. Pencemaran

Jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17.523.967 kendaraan (**SLHD** Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Beban industri skala menengah dan besar di wilayah DKI Jakarta yang menghasilkan limbah BOD 17.818,18 Ton/Tahun, COD 1.673,14 Ton/Tahun, TSS 7.849 Ton/Tahun dan lainnya 212,35 Ton/Tahun (**SLHD** Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri (**SLHD** Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015); jumlah industri skala kecil yang mencapai 34.994 industri (**SLHD** Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Perkiraan emisi CO₂ dari konsumsi energi dari sektor pengguna yang mencapai 206.797.291,456 Ton/Tahun (**SLHD** Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Data tersebut di atas menunjukkan penyebab masalah pencemaran lingkungan dan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Kualitas air sungai di Jakarta, pada umumnya tercemar sedang hingga berat. Demikian pula dengan kualitas situ, pada kondisi tercemar sedang hingga berat



10. Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Inovasi pada Bidang yang Bersifat Umum

1) Pendidikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan anggaran di bidang pendidikan pada tahun 2016. Peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 15,3 triliun atau sebesar 23% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta menghasilkan bertambahnya penerima Kartu Jakarta Pintar, perbaikan kualitas sekolah negeri karena menerima bantuan perbaikan gedung dan fasilitas lainnya, peningkatan sistem IT dan peningkatan kualitas pelajar. DKI Jakarta telah melakukan pembinaan bagi sekolah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta sehingga pada tahun 2016 terdapat 5 (lima) sekolah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu SD Tarakanita 3, SDN Cibubur 11, SMAN 34, SMAN 80, dan SMPN 228 yang berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan tertinggi di Tanah Air diberikan kepada sekolah yang peduli dan cinta lingkungan. Hal ini suatu prestasi yang tinggi karena penghargaan terakhir diperoleh pada tahun 2016 yaitu SDN Sungai Bambu 05, Kota Administrasi Jakarta Utara (<http://wartakota.tribunnews.com/2016/07/25/5-sekolah-jakarta-dapat-penghargaan-cinta-lingkungan-adiwiyata-mandiri>). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan, juga memberi penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI sehingga terdapat 25 (dua puluh lima sekolah) sekolah se-DKI Jakarta yang memperoleh penghargaan tersebut.

2) Kesehatan

Pemerintah Provinsi DKI melakukan inovasi di bidang kesehatan antara lain :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, dimana menjelaskan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (peserta Mandiri) yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat langsung dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Provinsi DKI Jakarta apabila

- (1) pendaftar baru di kelas III
- (2) peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 bulan iuran



(3) peserta yang terdaftar di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 bulan.

3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu program Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan prima (*service excellent*) berupa pengurusan perizinan maupun non perizinan, yang pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya suatu dokumen dilakukan di satu tempat sehingga proses menjadi lebih cepat, lebih transparan, bebas pungli, lebih ramah dan lebih jelas persyaratan dan biayanya.

PTSP telah membuat inovasi pertama di dunia yaitu program Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB) untuk semua pengurusan perizinan /non perizinan usaha dan investasi seperti Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA), Izin Angka Pengenal Import (API), Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Penelitian dan Legalisir Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB). Inovasi Pemerintah DKI Jakarta adalah bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta menerapkan sistem pembayaran non tunai yaitu e-perizinan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) pada tahun 2016 telah menerbitkan 94 izin lingkungan.

4) Pembangunan Wisata

Provinsi DKI Jakarta dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata meliputi *business tourism, maritime tourism culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism*. Merevitalisasi kawasan Museum Bahari hingga Muara Angke dengan restoran apung yang menyediakan olahan makanan laut guna menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi wisata dengan mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat budaya dan pendidikan bahari;

Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan peningkatan pelayanan prima di bidang pariwisata termasuk peningkatan bus tingkat pariwisata dimana penumpang tidak dipungut biaya, dan bisa naik bus di setiap halte dengan logo bertuliskan *City Tour*. Pada tahun 2015 terdapat bus tingkat pariwisata gratis sejumlah 7 bus, sedangkan pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki bus tingkat pariwisata sejumlah 18 bus melalui pengelolaan CSR.



Dengan demikian, terjadi peningkatan ketersediaan jumlah bus pariwisata gratis sebesar 157%.

b. Inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terkait Lingkungan Hidup

1) Inovasi di bidang penanganan Banjir

Inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor pengentasan banjir yang paling terkenal adalah program multi year berupa normalisasi sungai, kali dan waduk di DKI Jakarta, termasuk proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pembangunan dan peningkatan sistem pompa pengendali banjir, penanganan sampah dan badan air, pengembangan tanggul pantai fase A mendukung proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Timur memerlukan anggaran tertinggi dari APBD Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 177.394.199.277 atau sebesar 0,26 % dari total anggaran APBD. Selanjutnya Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 150.376.897.608 atau sebesar 0,22 % dari total anggaran APBD dan Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Tengah sebesar Rp. 49.999.461.637 atau sebesar 0,07 % dari total anggaran APBD. Peningkatan Pemanfaatan Alat-alat berat untuk mendukung Peningkatan kapasitas waduk/kali/saluran dianggarkan sebesar Rp. 42.165.040.640 atau sebesar 0,06 % dari total pembiayaan APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan tanah waduk, situ, dan embung di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 391.701.695.000 atau sebesar 0,58% dari total pembiayaan APBD. Pemantauan Kualitas Air Situ/Waduk Rp. 167.205.000.000 atau sebesar 0,25% dari total pembiayaan APBD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya terbesar dari anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 untuk Waduk adalah pada bagian pengadaan tanah waduk, situ, dan embung di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 0,58 % dari total pembiayaan Anggaran.

2) Inovasi di Bidang Persampahan

Permasalahan persampahan Provinsi DKI Jakarta semakin kompleks seiring dengan peningkatan jumlah volume sampah yaitu sebesar 7.500 Ton per hari akibat pertambahan penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 400 Tahun 2016 tentang



Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Sampah Terpadu. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah baik tingkat kecamatan kelurahan maupun RT/RW maupun sekolah. Selanjutnya pengembangan jejaring kerja dengan dengan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan regulasi berupa Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

Pembentukan armada pasukan oranye (Dinas Kebersihan) pada tahun 2016 untuk menangani kebersihan jalanan dan menangani sampah dan kali. Pasukan oranye merupakan pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang diberi gaji sesuai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan menerima BPJS. Ada pula pasukan oranye yang bertugas membersihkan got di permukiman, menebang pohon, memperbaiki jalan berlubang, perbaikan trotoar, mengecat trotoar, dan lainnya dinamakan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU. Pada tahun 2016 pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menambah armada pasukan oranye untuk pengelolaan persampahan di Provinsi DKI Jakarta. Konsep DKI Jakarta sebagai smart city adalah meningkatkan partisipasi warga seperti membuat data, aplikasi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan. Kota DKI Jakarta menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintahnya, kekuasaannya, uangnya, dan ruangnya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik. QLUE adalah aplikasi media sosial untuk melaporkan permasalahan kota kepada pemerintah, pihak swasta ataupun saling berbagi informasi sesama warga di lingkungan demi terciptanya Provinsi DKI Jakarta sebagai Smart City.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi pengembangan pembangunan pasar dengan berpedoman tata kelola lingkungan hidup untuk perbaikan sanitasi dan sistem pengelolaan sampah;

3) Inovasi di Bidang Transportasi

Model sistem pembayaran bustrans menjadi satu pintu menjadi pembayaran non tunai berupa Kartu Elektronik bekerja sama dengan perbankan. Inovasi ini membuat seluruh sistem bus trans terintegrasi dengan baik dari segi keuangan maupun sistem informasi jumlah penumpang berdasarkan tempat asal dan tujuan. Selain itu, pembayaran non tunai menciptakan paper less yang ramah lingkungan



dari sampah struk bukti tiket pembayaran; Selain itu penambahan armada Bus Transjakarta 247 bus pada tahun 2016 termasuk Bus Transjakarta Pink sebanyak 12 unit yang terdiri dari 2 unit bus gandeng dan 10 unit bus single. Bus Transjakarta Pink merupakan bus yang dikhususkan bagi penumpang perempuan sehingga penumpang wanita merasa aman dan nyaman secara otomatis meningkatkan pelayanan bus transjakarta. Pembangunan moda Transportasi berbasis Rel berupa pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) koridor Utara – Selatan Tahap I (Bundaran HI-Lebak Bulus (Progress 56,41 % telah selesai) dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Koridor I, Velodrome, Kelapa Gading (Progress 48% telah selesai). Penambahan pembangunan Jalan Layang untuk penanggulangan kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan pembangunan Revitaliasi pelabuhan Muara Angke dengan menganggarkan dari dana APBD sebesar 72 Milyar atau sebesar 11 persen dari total Anggaran APBD DKI Jakarta . Penyusunan Draft regulasi dan penetapan Electronic Road Pricing (ERP). Sebagai upaya untuk memudahkan difabel dalam beraktivitas di jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 Triliun untuk pembangunan trotoar yang ramah difabel sepanjang 2.600 km. Salah satu contoh trotoar yang telah dibangun dan berfungsi adalah trotoar yang berlokasi di depan RSCM. Kaum difabel warga Jakarta mendapat fasilitas dan subsidi yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan transportasi berupa program yang dinamakan Transjakarta Cares. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inovasi berupa bus Transjakarta model lower-deck yang akan membantu kaum difabel sebagai pengguna. Akses transportasi kaum difabel di kota Jakarta pun akan semakin dipermudah. Untuk mempermudah mobilitas warga, seperti pasar di Bendungan Hilir direncanakan terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

4) Inovasi di Bidang Permukiman

Kondisi wilayah DKI Jakarta yang mempunyai keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin tinggi dan banyaknya perumahan kumuh, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Inovasi pengembangan perumahan vertikal dengan memanfaatkan keterbatasan tanah untuk penataan tata ruang dan pengolahan sampah mandiri. Pembangunan rusun pada tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya, unit rusun yang dibangun akan dilengkapi instalasi



pipa jaringan gas. Selain pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebanyak 38 rumah susun (rusun) akan dibangun mulai tahun ini di Jakarta sementara satu rusun lainnya masih dalam proses pembebasan lahan. Pembangunan permukiman terpadu dengan hunian vertikal berupa apartemen atau rumah susun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga. Pembangunan secara vertikal sesuai dengan karakteristik perkotaan padat seperti Jakarta yang tidak memungkinkan pembangunan secara horizontal.

5) Inovasi Penanganan Pencemaran

Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran khususnya pencemaran udara adalah dengan membangun beberapa taman, ruang terbuka hijau maupun hutan kota. Pada Tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki 3.131 Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana wilayah Jakarta Pusat memiliki Ruang Terbuka Hijau terbanyak, yaitu 913 RTH. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 123 RPTRA yang bersumber dari dana APBD DKI Jakarta dan 65 RPTRA yang bersumber dari CSR Swasta. Pembangunan RPTRA yang paling fenomenal adalah pengembalian fungsi wilayah Kalijodo menjadi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Area RTH dan RPTRA Kalijodo, atau yang populer disebut Taman Kalijodo, sebagian terletak di Jalan Kepanduan, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Timur dan di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Disisi lain Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan program revitalisasi dan plakatikasi serta perluasan Taman Pemakaman Umum walaupun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan masalah pembebasan lahan untuk TPU.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membentuk Pasukan Hijau pada tahun 2016. Pasukan Hijau adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Pasukan hijau bertugas memelihara dan merawat taman dan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen kuat untuk mengurangi efek rumah kaca yang berdampak terhadap perubahan iklim. Kenaikan konsentrasi Karbon Dioksida (CO₂) dan Gas Metana yang merupakan senyawa berbentuk gas akibat pembakaran bahan bakar bumi (fossil fuel) sehingga menghasilkan gas rumah kaca. Untuk menguranginya maka direncanakan bukan hanya kendaraan dinas operasional saja yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) tetapi kendaraan



pribadi para Aparatur Sipil Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta diubah sistem penggunaan Bahan Bakar yang menggunakan fosil fuel menjadi pengguna Bahan Bakar Gas. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji emisi gratis bagi kendaraan bermotor pada tahun 2016 dalam rangka mendukung program Langit Biru dan Green City dan upaya untuk mengurangi pencemaran udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan inovasi pembelian kendaraan yang ramah lingkungan. Dinas Lingkungan DKI mengganti truk sampah konvensional dengan tipe compactor. Truk compactor dinilai lebih baik. Desainnya dengan bak tertutup memungkinkan pengangkutan sampah yang bebas bau. Kondisi truk tersebut lebih aman untuk mengangkut sampah karena meminimalkan kemungkinan sampah tercecer sepanjang perjalanan menuju tempat pembuangan akhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi membentuk tim kerja hari bebas kendaraan bermotor dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 545 Tahun tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Semua regulasi yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta bertujuan untuk mendorong pelaksanaan dan memperluas area Car Free Day yang diadakan setiap akhir pekan. Untuk mendukung Program Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengadakan pembinaan dan sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai benefit dari Proklam agar masyarakat tergerak untuk mengembangkan daerah di sekitarnya dalam aspek penghijauan dan pengelolaan sampah serta dapat meminimalisir dampak perubahan iklim baik di Kelurahan, RT dan RW. Partisipasi Peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan kota DKI Jakarta berwawasan lingkungan pada tahun 2016 dapat dilihat dari penghargaan PROPER yang mereka terima. Walaupun PROPER berasal dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, namun beberapa perusahaan di DKI Jakarta turut mendukung dan berpartisipasi aktif agar kualitas lingkungan hidup khususnya dalam penanganan pencemaran menjadi lebih baik.